



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Resor dalam menghadapi dinamika perkembangan bentuk ancaman tindak pidana khususnya kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang terjadi di kewilayahan, serta untuk penyesuaian nomenklatur pada kedokteran dan kesehatan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Resor;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

- Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 223);
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf m dan huruf n pada ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ml dan huruf v diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Polres dipimpin oleh Kapolres.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Wakapolres.
- (3) Susunan organisasi Polres terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan;
 - c. Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi;
 - d. Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan;
 - e. Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
 - f. Bagian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik;
 - g. Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
 - h. Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum;

- i. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi;
 - j. Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum;
 - k. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
 - l. Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan;
 - m. Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal;
 - m1. Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang;
 - n. Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya;
 - o. Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat;
 - p. Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta;
 - q. Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas;
 - r. Satuan Pengamanan Objek Vital, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital;
 - s. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara;
 - t. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti;
 - u. Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan;
 - v. Seksi Kedokteran dan Kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedokteran dan Kesehatan; dan
 - w. Polsek, yang dipimpin oleh Kapolsek.
- (4) Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pimpinan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan unsur pengawas.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sampai dengan huruf j, merupakan unsur pembantu pimpinan/pelayan.
- (7) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l sampai

dengan huruf t, merupakan unsur pelaksana tugas pokok.

- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf u dan huruf v, merupakan unsur pendukung.
 - (9) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf w, merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
 - (10) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9) bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - (11) Dalam melaksanakan tugasnya pada Polres tipe A, Polres tipe B, dan Polres tipe C, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, sampai dengan huruf s dibantu oleh Wakil Kepala Satuan.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
 - b. dihapus;
 - c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
 - e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
 - f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
 - a. Urusan Pembinaan Operasional;
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
 - c. Urusan Identifikasi; dan
 - d. Unit.
 - (2) Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
 - (3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
 - (4) Urusan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
 - (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus dan tertentu di daerah hukum Polres.
 - (6) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Unit.
4. Di antara Paragraf 3 dan Paragraf 4 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A

Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang

5. Di antara Pasal 34 dan 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m1 bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana khususnya kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - b. pelayanan dan pelindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanganan dan pelindungan secara terpadu melalui analisis dan evaluasi;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia di jajaran Polres;
 - e. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas Satres PPA dan PPO;
 - f. pembinaan penyelidikan dan penyidikan serta pemberian bantuan teknis terhadap penegakan hukum di lingkungan Polsek; dan
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait dalam penanganan, pelindungan, dan pemulihan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana kekerasan perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B

- (1) Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A terdiri atas:
 - a. Urusan Pembinaan Operasional;
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan; dan
 - c. Unit.
- (2) Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang.

- (3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
 - (4) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain, serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
 - (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Unit.
 - (6) Pembentukan dan operasional Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf v, bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat pada klinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaaan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedokteran dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, *disaster victim investigation* dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
 - d. penyiapan dan pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:

- a. Subseksi Kedokteran Kepolisian;
 - b. Subseksi Kesehatan Kepolisian; dan
 - c. Urusan Administrasi.
- (2) Subseksi Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional kedokteran forensik, kegiatan *disaster victim investigation*, melaksanakan kegiatan Keskamtibmas.
 - (3) Subseksi Kesehatan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan di klinik bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarga dan masyarakat, kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan.
 - (4) Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.
8. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

9. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Polres yang telah terbentuk Satres PPA dan PPO, operasionalnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A dan Pasal 34B.
 - (2) Polres yang belum terbentuk Satres PPA dan PPO, struktur organisasi dan Daftar Susunan Personel sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
10. Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 650

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN
RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

DAFTAR PENYEBUTAN

A. Unit Organisasi Polres:

1. Seksi Pengawas disebut Siwas;
2. Seksi Profesi dan Pengamanan disebut Sipropam;
3. Bagian Operasi disebut Bagops;
4. Bagian Perencanaan disebut Bagren;
5. Bagian Sumber Daya Manusia disebut Bag SDM;
6. Bagian Logistik disebut Baglog;
7. Seksi Hubungan Masyarakat disebut Sihumas;
8. Seksi Hukum disebut Sikum;
9. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi disebut Si TIK;
10. Seksi Umum disebut Sium;
11. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT;
12. Satuan Intelijen Keamanan disebut Satintelkam;
13. Satuan Reserse Kriminal disebut Satreskrim;
14. Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang disebut Satres PPA dan PPO;
15. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya disebut Satresnarkoba;
16. Satuan Pembinaan Masyarakat disebut Satbinmas;
17. Satuan Samapta disebut Satsamapta;
18. Satuan Lalu Lintas disebut Satlantas;
19. Satuan Pengamanan Objek Vital disebut Satpamobvit;
20. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara disebut Satpolairud;
21. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disebut Sattahti;
22. Seksi Keuangan disebut Sikeu;
23. Seksi Kedokteran dan Kesehatan disebut Sidokkes;
24. Sub Seksi Operasional disebut Subsioptionsal;
25. Sub Seksi Pembinaan disebut Subsibin;
26. Sub Seksi Pengaduan Masyarakat disebut Subsidumas;
27. Urusan Administrasi disebut Urmin;
28. Unit Pengamanan Internal disebut Unitpaminal;
29. Sub Bagian Pembinaan Operasi disebut Subbagbinops;
30. Sub Bagian Pengendalian Operasi disebut Subbagdalops;
31. Sub Bagian Kerja Sama disebut Subbagkerma;
32. Sub Bagian Strategi Manajemen dan Reformasi Birokrasi disebut Subbagstrajemen dan RB;
33. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran disebut Subbagrenprogar;
34. Sub Bagian Pengendalian Program dan Anggaran disebut Subbagdalprogar;

35. Sub Bagian Pembinaan Karier disebut Subbagbinkar;
36. Sub Bagian Perawatan Personel disebut Subbagwatpers;
37. Sub Bagian Pengendalian Personel disebut Subbagdalpers;
38. Sub Bagian Perbekalan dan Peralatan disebut Subbagbekpal;
39. Sub Bagian Fasilitas dan Konstruksi disebut Subbagfaskon;
40. Sub Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia disebut Subsidi PIDM;
41. Sub Seksi Penerangan Masyarakat disebut Subsipenmas;
42. Sub Seksi Bantuan Hukum disebut Subsibankum;
43. Sub Seksi Penyuluhan Hukum disebut Subsiluhkum;
44. Sub Seksi Teknologi Komunikasi disebut Subsitekkom;
45. Sub Seksi Teknologi Informasi disebut Subsitekinfo;
46. Sub Seksi Administrasi dan Ketatausahaan disebut Subsिमintu;
47. Sub Seksi Pelayanan Markas disebut Subsiyannya;
48. Urusan Pembinaan Operasional disebut Urbinopsnal;
49. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disebut Urmintu;
50. Urusan Pelayanan Administrasi disebut Uryanmin;
51. Urusan Identifikasi disebut Urident;
52. Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat disebut Unit Binpolmas;
53. Unit Pembinaan Ketertiban Sosial disebut Unit Bintibsos;
54. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa disebut Unit Binkamsa;
55. Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disebut Unit Bhabinkamtibmas;
56. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli disebut Unit Turjawali;
57. Unit Pengamanan Objek Vital disebut Unit Pamobvit;
58. Unit Pengendalian Massa disebut Unit Dalmas;
59. Unit Polisi Satwa disebut Unit Polsatwa;
60. Unit Keamanan dan Keselamatan disebut Unit Kamsel;
61. Unit Registrasi dan Identifikasi disebut Unit Regident;
62. Unit Penegakan Hukum disebut Unit Gakkum;
63. Unit Pengamanan Kawasan Tertentu disebut Unit Pamwaster;
64. Unit Pengamanan Pariwisata disebut Unit Pamwisata;
65. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal disebut Unit Harkan Kapal;
66. Unit Perawatan Tahanan disebut Unit Wattah;
67. Unit Barang Bukti disebut Unit Barbuk;
68. Sub Seksi Gaji disebut Subsijaji;
69. Sub Seksi Verifikasi disebut Subsiverif;
70. Sub Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebut Subsidi APK;
71. Sub Seksi Kedokteran Kepolisian disebut Subsidoakpol;
72. Sub Seksi Kesehatan Kepolisian disebut Subsikespol.

B. Unit Organisasi Polsek

1. Unit Profesi dan Pengamanan disebut Unit Propam;
2. Seksi Umum disebut Sium;
3. Seksi Hubungan Masyarakat disebut Sihumas;
4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu diberikan singkatan SPKT;
5. Unit Intelijen Keamanan disebut Unit Intelkam;
6. Unit Reserse Kriminal disebut Unit Reskrim;
7. Unit Pembinaan Masyarakat disebut Unit Binmas;
8. Unit Lalu Lintas disebut Unit Lantas;
9. Unit Polisi Perairan disebut Unit Polair;
10. Perwira Unit Pengamanan Internal disebut Panitpaminal;
11. Perwira Unit Provos disebut Panit Provos;

12. Urusan Perencanaan Administrasi disebut Urrenmin;
13. Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam disebut Urtaud;
14. Urusan Tahanan dan Barang Bukti disebut Urtahti;
15. Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Multimedia disebut Subsidi PIDM;
16. Sub Seksi Penerangan Masyarakat disebut Subsipenmas;
17. Perwira Unit Operasional disebut Panitopsnal;
18. Perwira Urusan Administrasi disebut Paurmin;
19. Perwira Unit Pelayanan Administrasi disebut Panityanmin;
20. Sub Unit disebut Subnit;
21. Sub Unit Identifikasi disebut Subnitident;
22. Sub Unit Pembinaan Perpolisian Pemolisian Masyarakat disebut Subnitbinpolmas;
23. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Sosial disebut Subnitbintibsos;
24. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa disebut Subnitbinkamsa;
25. Sub Unit Patroli disebut Subnitpatroli;
26. Sub Unit Pengendalian Massa disebut Subnitdalmas;
27. Sub Unit Kecelakaan disebut Subnitlaka;
28. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli disebut Subnitturjawali;
29. Perwira Unit Patroli Polair disebut Panit Patroli Polair;
30. Perwira Unit Pembinaan Masyarakat Perairan disebut Panitbinmasair;
31. Urusan Administrasi disebut Urmin;
32. Unit Pelayanan Masyarakat disebut Unityanmas.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

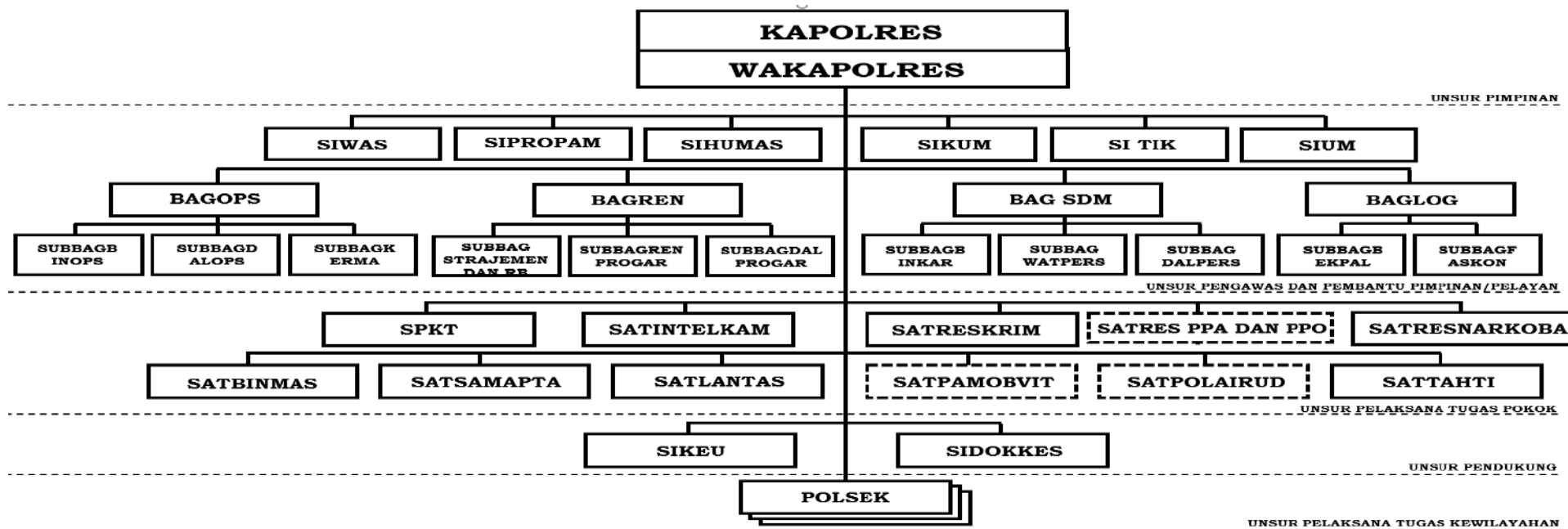
ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT
KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES

1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRI



Keterangan: Khusus unit organisasi Satlantans pada Polres Tipe B yang berkedudukan di Polda Metro Jaya, pembinaan dan operasional dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

2. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL

a. POLRES TIPE A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
1	0	UNSUR PIMPINAN				
		PIMPINAN				
	1	Kapolres	KBP	II B	1	
	2	Wakapolres	AKBP	III A	1	
					2	
2	0	UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU				
		PIMPINAN/PELAYAN				
		BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Pamin pada Urmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubbagbinops	KP	III B	1	
	5	Kasubbagdalops	KP	III B	1	
	6	Kasubbagkerma	KP	III B	1	
	7	Kaur pada Subbag	AKP	IV A	3	
	8	Paur pada Subbag	IP	IV B	6	
9	Pa Siaga	IP	IV B	3		
10	Bamin	BA	-	18		
11	Banum	PNS II/I	-	7		
					43	
3	0	BAGREN				
	1	Kabagren	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Pamin pada Urmin	PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubbagstrajemen dan RB	KP/PNS IV a	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7	
	5	Kasubbagrenprogar	KP/PNS IV a	III B	1		
	6	Kasubbagdalprogar	KP/PNS IV a	III B	1		
	7	Kaur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3		
	8	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3		
	9	Bamin pada Subbag	BA	-	6		
	10	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	7		
							25
	4	0	BAG SDM				
		1	Kabag SDM	AKBP	III A		1
		2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A		1
3		Pamin pada Urmin	PNS III a/b	IV B	1		
4		Kasubbagbinkar	KP/PNS IV a	III B	1		
5		Kasubbagwatpers	KP/PNS IV a	III B	1		
6		Kasubdalpers	KP/PNS IV a	III B	1		
7		Kaur pada Subbagpers	AKP/PNS III c/d	IV A	3		
8		Paur pada Subbagpers	IP/PNS III a/b	IV B	3		
9		Bamin pada Subbag	BA	-	6		
10	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	7			
					25		
5	0	BAGLOG					
	1	Kabaglog	AKBP	III A	1		
	2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	3	Pamin pada Urmin	PNS III a/b	IV B	1		
	4	Kasubbagbekpal	KP/PNS IV a	III B	1		
	5	Kasubbagfaskon	KP/PNS IV a	III B	1		
	6	Kaur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	7	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	2		
	8	Bamin pada Subbag	BA	-	4		
9	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	5			
					18		

1	2	3	4	5	6	7
6	0	SIWAS				
	1	Kasiwas	KP	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubsopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Kasubsibin	AKP	IV A	1	
	5	Kasubsidumas	AKP	IV A	1	
	6	Paur pada Subsidi	IP	IV B	3	
	7	Bamin pada Paur	BA	-	3	
	8	Banum pada Paur	PNS II/I	-	4	
					15	
7	0	SIPROPAM				
	1	Kasipropam	KP	III B	1	
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	4	Kanitprovos	AKP	IV A	1	
	5	Kanitpaminal	AKP	IV A	1	
	6	Panit	IP	IV B	4	
	7	Banit	BA	-	24	
	8	Banum	PNS II/I	-	4	
					38	
8	0	SIHUMAS				
	1	Kasihumas	KP	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubsi PIDM	AKP	IV A	1	
	4	Kasubsipenmas	AKP	IV A	1	
	5	Paur pada Subsidi	IP	IV B	2	
	6	Bamin pada Paur	BA	-	2	
	7	Banum pada Paur	PNS II/I	-	3	
					11	

1	2	3	4	5	6	7
9	0	SIKUM				
	1	Kasikum	KP	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubsibankum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kasubsiluhkum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin pada Paur	BA	-	2	
	7	Banum pada Paur	PNS II/I	-	3	
					11	
10	0	SI TIK				
	1	Kasi TIK	KP	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kasubsitekkom	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubsitekinfo	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Paur pada Subsidi	IP	IV B	2	
	7	Bamin pada Subsidi	BA	-	4	
8	Banum pada Subsidi	PNS II/I	-	4		
					15	
11	0	SIUM				
	1	Kasium	KP	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubsimintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kasubsijanma	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	5	
	6	Bamin pada Paur	BA	-	12	
	7	Banum pada Paur	PNS II/I	-	7	
					28	

1	2	3	4	5	6	7
12	0	UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SPKT				
	1	Ka SPKT	KP	III B	1	
	2	Kanit	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	3	
	4	Banit	BA	-	15	
					22	
13	0	SATINTELKAM				
	1	Kasatintelkam	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatintelkam	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin/Banum pada Kaurmintu	BA/PNS II/I	-	1	
	7	Kauryanmin	IP	IV B	1	
	8	Bamin/Banum pada Kauryanmin	BA/PNS II/I	-	3	
	9	Kanit	AKP	IV A	6	
	10	Kasubnit	IP	IV B	12	
11	Banit pada Subnit	BA	-	72		
					100	
14	0	SATRESKRIM				
	1	Kasatreskrim	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatreskrim	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin pada Kaurmintu	BA	-	2	
7	Banum pada Kaurmintu	PNS II/I	-	2		

1	2	3	4	5	6	7	
15	8	Kaurident	AKP	IV A	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
	9	Paurident	IP	IV B	2		
	10	Baurident	BA	-	12		
	11	Kanit	AKP	IV A	5		
	12	Kasubnit	IP	IV B	10		
	13	Banit pada Subnit	BA	-	120		
	14	Banum pada Unit	PNS II/I	-	5		
							164
		0	SATRES PPA dan PPO*)				
		1	Kasatres PPA dan PPO	AKBP	III A		1
		2	Wakasatres PPA dan PPO	KP	III B		1
		3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A		1
		4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-		1
		5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B		1
	6	Bamin pada Urmintu	BA	-	2		
	7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2		
	8	Kanit	AKP	IV A	3		
	9	Kasubnit	IP	IV B	6		
	10	Banit	BA	-	72		
	11	Banum pada Unit	PNS II/I	-	6		
					96		
16	0	SATRESNARKOBA					
	1	Kasatresnarkoba	AKBP	III A	1		
	2	Wakasatresnarkoba	KP	III B	1		
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin pada Urmintu	BA	-	2		
	7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2		
	8	Kanit	AKP	IV A	3		
9	Kasubnit	IP	IV B	6			

1	2	3	4	5	6	7
17	10	Banit	BA	-	72	
	11	Banum pada Subnit	PNS II/I		6	
		0 SATBINMAS				96
	1	Kasatbinmas	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatbinmas	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	8	Kanitbinpolmas	AKP	IV A	1	
	9	Kasubnit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	2	
	11	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2	
	12	Kanitbintibsos	AKP	IV A	1	
	13	Kasubnit	IP	IV B	2	
	14	Banit	BA	-	2	
	15	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2	
	16	Kanitbinkamsa	AKP	IV A	1	
	17	Kasubnit	IP	IV B	2	
	18	Banit	BA	-	2	
	19	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2	
	20	Kanitbhabinkamtibmas	AKP	IV A	1	
	21	Kasubnit	IP	IV B	2	
22	Banit	BA	-	2		
23	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2		
					35	

1	2	3	4	5	6	7
18	0	SATSAMAPTA				
	1	Kasatsamapta	AKBP	III A	1	
	2	Wakasamapta	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	2	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin pada Urmintu	BA	-	1	
	7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	1	
	8	Kanitturjawali	AKP	IV A	1	
	9	Kasubnit	IP	IV B	4	
	10	Banit	BA	-	60	
	11	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2	
	12	Kanitpamobvit	AKP	IV A	1	
	13	Kasubnit	IP	IV B	2	
	14	Banit	BA	-	20	
	15	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2	
	16	Kanitdalmas	AKP	IV A	1	
	17	Kasubnit	IP	IV B	4	
	18	Banit	BA	-	120	
	19	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	4	
	20	Kanitpolsatwa*)	AKP	IV A	1*)	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.
	21	Kasubnit*)	IP	IV B	2*)	
	22	Banit*)	BA	-	8*)	
23	Banum pada Subnit *)	PNS II/I	-	2*)		
					229	Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa

1	2	3	4	5	6	7
19	0	SATLANTAS				
	1	Kasatlantas	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatlantas	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	3	
	6	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	7	Bamin pada Urmintu	BA	-	2	
	8	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2	
	9	Kanitturjagwali	AKP	IV A	1	
	10	Kasubnit	IP	IV B	2	
	11	Banit	BA	-	120	
	12	Kanitkamsel	AKP	IV A	1	
	13	Kasubnit	IP	IV B	3	
	14	Banit	BA	-	12	
	15	Kanitregident	AKP	IV A	1	
	16	Kasubnit	IP	IV B	3	
	17	Banit	BA	-	15	
	18	Kanitgakkum	AKP	IV A	1	
	19	Kasubnit	IP	IV B	2	
	20	Banit	BA	-	16	
	21	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	4	
					192	
20	0	SATPAMOBVIT*)				
	1	Kasatpamobvit	AKBP	III A	1	*) Pembentukan nya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
	2	Wakasatpamobvit	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	

1	2	3	4	5	6	7	
21	7	Kanitpamwaster	AKP	IV A	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
	8	Panit	IP	IV B	3		
	9	Banit	BA	-	15		
	10	Banum	PNS II/I	-	3		
	11	Kanitpamwisata	AKP	IV A	1		
	12	Panit	IP	IV B	2		
	13	Banit	BA	-	10		
	14	Banum	PNS II/I	-	2		
	0	SATPOLAIRUD*)					46
	1	Kasatpolairud	AKBP	III A	1		
	2	Wakasatpolairud	KP	III B	1		
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Bamin/Banum	BA	-	2		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	7	Kanitgakkum	AKP	IV A	1		
	8	Kasubnitlidik	IP	IV B	1		
	9	Kasubnittindak	IP	IV B	1		
	10	Banit	BA	-	16		
	11	Banum	PNS II/I	-	1		
	12	Kanitpatroli	AKP	IV A	1		
13	Kasubnitpatwalair	IP	IV B	1			
14	Kasubnitbinmasair	IP	IV B	1			
15	Banit	BA	-	14			
16	Banum	PNS II/I	-	1			
17	Kanitharkan Kapal	AKP	IV A	1			
18	Banit	BA	-	5			
19	Banum	PNS II/I	-	1			

1	2	3	4	5	6	7
	20	ABK Kapal*)			-	*) Sesuai jumlah kapal yang ada
22	0	SATTAHTI			53	
	1	Kasattahti	KP	III B	1	
	2	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kanitwattah	AKP	IV A	1	
	4	Kanitbarbuk	AKP	IV A	1	
	5	Panit	IP	IV B	2	
	6	Bamin pada Unit	BA	-	8	
	7	Banum pada Unit	PNS II/I	-	7	
					21	
23	0	UNSUR PENDUKUNG SIKEU				
	1	Kasikeu	KP/PNS IV a	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/ PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	4	Kasubsigaji	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubsiverif	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Kasubsi APK	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	7	Bamin pada Subsidi	BA	-	3	
	8	Banum pada Subsidi	PNS II/I	-	3	
					13	
24	0	SIDOKKES				
	1	Kasidokkes	KP	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum pada Urmin	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kasubsidokpol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubsikespol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	7	Bamin/Banum pada Subsidi	BA/PNS II/I	-	6	
					13	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE A

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1	1					2				0	2	
2	BAGOPS		1	3	3	9	18	34		2	7	9	43	
3	BAGREN		1	3	2	2	6	14		4	7	11	25	
4	BAG SDM		1	3	3	1	6	14		4	7	11	25	
5	BAG LOG		1	2	2	1	4	10		3	5	8	18	
6	SIWAS			1	3	3	3	10		1	4	5	15	
7	SIPROPAM			1	2	4	24	31		1	6	7	38	
8	SIHUMAS			1	2	2	2	7		1	3	4	11	
9	SIKUM			1	2	2	2	7		1	3	4	11	
10	SI TIK			1	2	2	4	9		1	5	6	15	
11	SIUM			1	1	3	12	17		4	7	11	28	
12	SPKT			1	3	3	15	22				0	22	
13	SATINTELKAM		1	1	7	13	72	94		1	5	6	100	
14	SATRESKRIM		1	1	7	12	134	155		1	8	9	164	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO
15	SATRES PPA DAN PPO*)		1	1	4	6	74	86		1	9	10	96	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
16	SATRESNARKOBA		1	1	4	6	74	86		1	9	10	96	
17	SATBINMAS		1	1	5	8	8	23		1	11	12	35	
18	SATSAMAPTA		1	1	4	10	201	217		1	11	12	229	
19	SATLANTAS		1	1	5	10	165	182		1	9	10	192	

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
20	SATPAMOBVIT*)		1	1	3	5	25	35		1	10	11	46	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
21	SATPOLAIRUD*)		1	1	4	4	37	47		1	5	6	53	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
22	SATTAHTI			1	2	2	8	13		1	7	8	21	
23	SIKEU			1	1	1	4	7		2	4	6	13	
24	SIDOKKES			1	1	1	3	6		3	4	7	13	
JUMLAH		1	14	30	72	110	901	1128	0	37	146	183	1311	*) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk

b. POLRES TIPE B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
1	0	UNSUR PIMPINAN				
		PIMPINAN				
		1 Kapolres	KBP	II B	1	
	2 Wakapolres	AKBP	III A	1		
					2	
		UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN				
2	0	BAGOPS				
		1 Kabagops	AKBP	III A	1	
		2 Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
		3 Pamin pada Kaurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
		4 Kasubbagbinops	KP	III B	1	
		5 Kasubbagdalops	KP	III B	1	
		6 Kasubbagkerma	KP	III B	1	
		7 Kaur pada Subbag	AKP	IV A	3	
		8 Paur pada Subbag	IP	IV B	6	
		9 Pa Siaga	IP	IV B	3	
		10 Bamin	BA	-	18	
11 Banum	PNS II/I	-	6			
				42		

1	2	3	4	5	6	7
3	0	BAGREN				
	1	Kabagren	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Pamin pada Urmin	PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubbagstrajemen dan RB	KP/PNS IV a	III B	1	
	5	Kasubbagrenprogar	KP/PNS IV a	III B	1	
	6	Kasubbagdalprogar	KP/PNS IV a	III B	1	
	7	Kaur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	8	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	9	Bamin pada Subbag	BA	-	6	
10	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	6		
					24	
4	0	BAG SDM				
	1	Kabag SDM	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Pamin pada Urmin	PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubbagbinkar	KP/PNS IV a	III B	1	
	5	Kasubbagwatpers	KP/PNS IV a	III B	1	
	6	Kasubbagdalpers	KP/PNS IV a	III B	1	
	7	Kaur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	10	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	13	Bamin pada Paur	BA	-	6	
14	Banum pada Paur	PNS II/I	-	6		
					24	
5	0	BAGLOG				
	1	Kabaglog	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
3	Pamin pada Urmin	PNS III a/b	IV B	1		

1	2	3	4	5	6	7	
6	4	Kasubbagbekpal	KP/PNS IV a	III B	1		
	5	Kasubbagfaskon	KP/PNS IV a	III B	1		
	6	Kaur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	7	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	2		
	8	Bamin pada Subbag	BA	-	4		
	9	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	4		
							17
		0	SIWAS				
		1	Kasiwas	KP	III B		1
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	3	Kasubsiopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Kasubsibin	AKP	IV A	1		
	5	Kasubsidumas	AKP	IV A	1		
	6	Paur pada Subsidi	IP	IV B	3		
	7	Bamin/Banum pada Paur	BA/PNS II/I	-	4		
					12		
7	0	SIPROPAM					
	1	Kasipropam	KP	III B	1		
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	4	Kanitprovos	AKP	IV A	1		
	5	Kanitpaminal	AKP	IV A	1		
	6	Panit	IP	IV B	4		
	7	Banit	BA	-	20		
	8	Banum	PNS II/I	-	2		
					32		
8	0	SIHUMAS					
	1	Kasihumas	KP	III B	1		
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1		

1	2	3	4	5	6	7	
9	3	Kasubsi PIDM	AKP	IV A	1		
	4	Kasubsipenmas	AKP	IV A	1		
	5	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	2		
	6	Bamin/Banum pada Paur	BA/PNS II/I	-	2		
							8
	0	SIKUM					
	1	Kasikum	KP	III B	1		
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	3	Kasubsibankum	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	4	Kasubsiluhkum	AKP/ PNS III c/d	IV A	1		
5	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	2			
6	Bamin/Banum pada Paur	BA/PNS II/I	-	2			
					8		
10	0	SI TIK					
	1	Kasi TIK	KP	III B	1		
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	3	Bamin/Banum pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1		
	4	Kasubsitekkom	AKP	IV A	1		
	5	Kasubsitekinfo	AKP	IV A	1		
	6	Paur pada Subsidi	IP	IV B	2		
	7	Bamin pada Subsidi	BA	-	4		
8	Banum pada Subsidi	PNS II/I	-	4			
					15		
11	0	SIUM					
	1	Kasium	KP/PNS IV a	III B	1		
	2	Paurmin pada Kasi	IP/ PNS III a/b	IV B	1		
	3	Kasubsimintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	4	Kasubsianma	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
5	Paur pada Subsidi	IP/ PNS III a/b	IV B	5			

1	2	3	4	5	6	7
12	6	Bamin/Banum pada Paur	BA/PNS II/I	-	14	
		UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SPKT			23	
	1	Ka SPKT	KP	III B	1	
	2	Kanit	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	3	
13	4	Banit	BA	-	12	
		SATINTELKAM			19	
	1	Kasatintelkam	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatintelkam	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin/Banum pada Kaurmintu	BA/PNS II/I	-	2	
	7	Kauryanmin	IP	IV B	1	
	8	Bamin/Banum pada Kauryanmin	BA/PNS II/I	-	3	
	9	Kanit	AKP	IV A	6	
14	10	Kasubnit	IP	IV B	12	
	11	Banit pada Subnit	BA	-	60	
		SATRESKRIM			89	
	1	Kasatreskrim	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatreskrim	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin pada Kaurmintu	BA	-	2	

1	2	3	4	5	6	7	
15	7	Banum pada Kaurmintu	PNS II/I	-	2	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
	8	Kaurident	AKP	IV A	1		
	9	Paurident	IP	IV B	2		
	10	Baurident	BA	-	12		
	11	Kanit	AKP	IV A	5		
	12	Kasubnit	IP	IV B	10		
	13	Banit pada Subnit	BA	-	100		
	14	Banum pada Unit	PNS II/I	-	5		
							144
	0		SATRES PPA DAN PPO*)				
	1	Kasatres PPA dan PPO	AKBP	III A	1		
	2	Wakasatres PPA dan PPA	KP	III B	1		
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1			
6	Bamin pada Urmintu	BA	-	2			
7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2			
8	Kanit	AKP	IV A	3			
9	Kasubnit	IP	IV B	6			
10	Banit	BA	-	60			
11	Banum pada Subnit	PNS II/I		6			
					84		
16	0		SATRESNARKOBA				
	1	Kasatresnarkoba	AKBP	III A	1		
	2	Wakasatresnarkoba	KP	III B	1		
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
6	Bamin pada Urmintu	BA	-	2			

1	2	3	4	5	6	7	
17	0	SATBINMAS					
	7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2		
	8	Kanit	AKP	IV A	3		
	9	Kasubnit	IP	IV B	6		
	10	Banit	BA	-	60		
	11	Banum pada Subnit	PNS II/I		6		
						84	
	1	Kasatbinmas	AKBP	III A	1		
	2	Wakasatbinmas	KP	III B	1		
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	8	Kanitbinpolmas	AKP	IV A	1		
	9	Kasubnit	IP	IV B	2		
	10	Banit	BA	-	2		
	11	Banum pada Unit	PNS II/I	-	1		
	12	Kanitbintibsos	AKP	IV A	1		
	13	Kasubnit	IP	IV B	2		
	14	Banit	BA	-	2		
	15	Banum pada Unit	PNS II/I	-	1		
	16	Kanitbinkamsa	AKP	IV A	1		
	17	Kasubnit	IP	IV B	2		
18	Banit	BA	-	2			
19	Banum pada Unit	PNS II/I	-	1			
20	Kanitbhabinkamtibmas	AKP	IV A	1			
21	Kasubnit	IP	IV B	2			
22	Banit	BA	-	2			
23	Banum pada Unit	PNS II/I	-	1			
					31		

1	2	3	4	5	6	7
18	0	SATSAMAPTA				
	1	Kasatsamapta	AKBP	III A	1	
	2	Wakasamapta	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	2	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin pada Urmintu	BA	-	1	
	7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	1	
	8	Kanitturjawali	AKP	IV A	1	
	9	Kasubnit	IP	IV B	4	
	10	Banit	BA	-	60	
	11	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1	
	12	Kanitpamobvit	AKP	IV A	1	
	13	Kasubnit	IP	IV B	2	
	14	Banit	BA	-	20	
	15	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1	
	16	Kanitdalmas	AKP	IV A	1	
	17	Kasubnit	IP	IV B	4	
	18	Banit	BA	-	120	
	19	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	2	
	20	Kanitpolsatwa*)	AKP	IV A	1*)	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.
	21	Kasubnit*)	IP	IV B	2*)	
	22	Banit*)	BA	-	8*)	
23	Banum pada Subnit (*)	PNS II/I	-	1*)		
					Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa	
					225	

1	2	3	4	5	6	7
19	0	SATLANTAS*)				*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
	1	Kasatlantas	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatlantas	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	3	
	6	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	7	Bamin pada Urmintu	BA	-	2	
	8	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2	
	9	Kanitturjagwali	AKP	IV A	1	
	10	Kasubnit	IP	IV B	2	
	11	Banit	BA	-	100	
	12	Kanitkamsel	AKP	IV A	1	
	13	Kasubnit	IP	IV B	3	
	14	Banit	BA	-	9	
	15	Kanitregident	AKP	IV A	1	
	16	Kasubnit	IP	IV B	3	
	17	Banit	BA	-	12	
	18	Kanitgakkum	AKP	IV A	1	
	19	Kasubnit	IP	IV B	2	
	20	Banit	BA	-	14	
	21	Banum pada Unit	PNS II/I	-	4	
					164	
20	0	SATPAMOBVIT*)				*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
	1	Kasatpamobvit	AKBP	III A	1	
	2	Wakasatpamobvit	KP	III B	1	
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		

1	2	3	4	5	6	7	
21	7	Kanitpamwaster	AKP	IV A	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
	8	Panit	IP	IV B	3		
	9	Banit	BA	-	15		
	10	Banum	PNS II/I	-	3		
	11	Kanitpamwisata	AKP	IV A	1		
	12	Panit	IP	IV B	2		
	13	Banit	BA	-	10		
	14	Banum	PNS II/I	-	2		
	0	SATPOLAIRUD*)					46
	1	Kasatpolairud	AKBP	III A	1		
	2	Wakasatpolairud	KP	III B	1		
	3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1		
	4	Bamin/Banum	BA	-	2		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	7	Kanitgakkum	AKP	IV A	1		
	8	Kasubnitlidik	IP	IV B	1		
	9	Kasubnittindak	IP	IV B	1		
	10	Banit	BA	-	16		
	11	Banum	PNS II/I	-	1		
12	Kanitpatroli	AKP	IV A	1			
13	Kasubnitpatwalair	IP	IV B	1			
14	Kasubnitbinmasair	IP	IV B	1			
15	Banit	BA	-	14			
16	Banum	PNS II/I	-	1			
17	Kanitharkan Kapal	AKP	IV A	1			
18	Banit	BA	-	5			
19	Banum	PNS II/I	-	1			
20	ABK Kapal*)				-	*) sesuai jumlah kapal yang ada	
					53		

1	2	3	4	5	6	7
22	0	SATTAHTI				
	1	Kasattahti	KP	III B	1	
	2	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kanitwattah	AKP	IV A	1	
	4	Kanitbarbuk	AKP	IV A	1	
	5	Panit	IP	IV B	2	
	6	Bamin pada Unit	BA	-	8	
	7	Banum pada Unit	PNS II/I	-	7	
					21	
23	0	UNSUR PENDUKUNG SIKEU				
	1	Kasikeu	KP/PNS IV a	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubsi Gaji	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kasubsiverif	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubsi APK	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
24	0	SIDOKKES				
	1	Kasidokkes	KP/PNS IVa	III B	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum pada Urmin	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kasubsidokpol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubsikespol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	7	Bamin/Banum pada Subsidi	BA/PNS II/I	-	4	
					11	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE B

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1	1					2				0	2	
2	BAGOPS		1	3	3	9	18	34		2	6	8	42	
3	BAGREN		1	3	2	2	6	14		4	6	10	24	
4	BAG SDM		1	3	2	2	6	14		4	6	10	24	
5	BAG LOG		1	2	1	1	4	9		4	4	8	17	
6	SIWAS			1	3	3	2	9		1	2	3	12	
7	SIPROPAM			1	2	4	20	27		1	4	5	32	
8	SIHUMAS			1	2	2	1	6		1	1	2	8	
9	SIKUM			1	1	1	1	4		3	1	4	8	
10	SI TIK			1	2	2	4	9		1	5	6	15	
11	SIUM			1	1	3	7	12		4	7	11	23	
12	SPKT			1	3	3	12	19				0	19	
13	SATINTELKAM		1	1	7	13	60	82		1	6	7	89	
14	SATRESKRIM		1	1	7	12	114	135		1	8	9	144	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO
15	SATRES PPA DAN PPO*)		1	1	4	6	62	74		1	9	10	84	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
16	SATRESNARKOBA		1	1	4	6	62	74		1	9	10	84	
17	SATBINMAS		1	1	5	8	8	23		1	7	8	31	
18	SATSAMAPTA		1	1	4	10	201	217		1	7	8	225	

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
19	SATLANTAS*)		1	1	5	10	137	154		1	9	10	164	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
20	SATPAMOBVIT*)		1	1	3	5	25	35		1	10	11	46	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
21	SATPOLAIRUD*)		1	1	4	4	37	47		1	5	6	53	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
22	SATTAHTI			1	2	2	8	13		1	7	8	21	
23	SIKEU			1	1	1	4	7		2	4	6	13	
24	SIDOKKES			1	1	2	2	6		2	3	5	11	
JUMLAH		1	14	30	69	111	801	1026	0	39	126	165	1191	*) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk

c. POLRES TIPE C

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PIMPINAN				
1	0	PIMPINAN				
	1	Kapolres	KBP	II B	1	
	2	Wakapolres	AKBP	III A	1	
					2	
		UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN				
2	0	BAGOPS				
	1	Kabagops	KP	III B	1	
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kasubbagbinops	AKP	IV A	1	
	5	Kasubbagdalops	AKP	IV A	1	
	6	Kasubbagkerma	AKP	IV A	1	
	7	Paur pada Subbag	IP	IV B	3	
	8	Pa Siaga	IP	IV B	3	
	9	Bamin	BA/PNS II/I	-	12	
	10	Banum	PNS II/I	-	3	
					27	
3	0	BAGREN				
	1	Kabagren	KP/PNS IVa	III B	1	
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kasubbagstrajemen dan RB	AKP/PNS III c/d	IVA	1	
	5	Kasubbagrenprogar	AKP/PNS III c/d	IVA	1	

1	2	3	4	5	6	7	
4	6	Kasubbagdalprogar	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	7	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3		
	8	Bamin pada Subbag	BA/PNS II/I	-	6		
	9	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	3		
		0	BAG SDM				18
	1	Kabag SDM	KP	III B	1		
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1		
	4	Kasubbagbinkar	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	5	Kasubbagwatpers	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	6	Kasubbagdalpers	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	7	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3		
	8	Bamin pada Paur	BA/PNS II/I	-	6		
9	Banum pada Paur	PNS II/I	-	3			
5	0	BAGLOG			18		
	1	Kabaglog	KP	III B	1		
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1		
	4	Kasubbagbekpal	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	5	Kasubbagfaskon	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	6	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	2		
	7	Bamin pada Subbag	BA/PNS II/I	-	4		
	8	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	2		
6	0	SIWAS			13		
	1	Kasiwas	AKP	IV A	1		
	2	Baurmin pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1		

1	2	3	4	5	6	7
	3	Kasubsopsnal	IP	IV B	1	
	4	Kasubsibin	IP	IV B	1	
	5	Kasubsidumas	IP	IV B	1	
	6	Bamin/Banum pada Subsidi	BA/PNS II/I	-	3	
					8	
7	0	SIPROPAM				
	1	Kasipropam	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	3	Kanitprovos	IP	IV B	1	
	4	Kanitpaminal	IP	IV B	1	
	5	Banit	BA	-	10	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
					18	
8	0	SIHUMAS				
	1	Kasihumas	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Kasubsidi PIDM	IP	IV B	1	
	4	Kasubsipenmas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					6	
9	0	SIKUM				
	1	Kasikum	AKP	IV A	1	
	2	Baurmin pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Kasubsibankum	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubsiluhkum	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					6	

1	2	3	4	5	6	7
10	0	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Baurmin/Banum pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Kasubsitekkom	IP	IV B	1	
	4	Kasubsitekinfo	IP	IV B	1	
	5	Bamin	BA	-	4	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
					10	
11	0	SIUM				
	1	Kasium	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Baurmin pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Kasubsimintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubsiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum pada Paur	BA/PNS II/I	-	12	
					16	
12	0	UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SPKT				
	1	Ka SPKT	AKP	IV A	1	
	2	Kanit	IP	IV B	3	
	3	Banit	BA	-	12	
					16	
13	0	SATINTELKAM				
	1	Kasatintelkam	KP	III B	1	
	2	Wakasatintelkam	AKP	IV A	1	
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin/Banum pada Kaurmintu	BA/PNS II/I	-	1	
	7	Kauryanmin	IP	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7	
14	8	Bamin/Banum pada Kauryanmin	BA/PNS II/I	-	3		
	9	Kanit	AKP	IV A	4		
	10	Kasubnit	IP	IV B	8		
	11	Banit pada Subnit	BA	-	48		
							70
		0	SATRESKRIM				
	1	Kasatreskrim	KP	III B	1		
	2	Wakasatreskrim	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin pada Kaurmintu	BA	-	2		
	7	Banum pada Kaurmintu	PNS II/I	-	2		
	8	Kaurident	AKP	IV A	1		
10	Baurident	BA	-	8			
11	Kanit	AKP	IV A	5			
12	Kasubnit	IP	IV B	10			
13	Banit pada Subnit	BA	-	60			
14	Banum pada Unit	PNS II/I	-	5			
					98		
15	0	SATRES PPA DAN PPO *)					
	1	Kasatres PPA dan PPO	KP	III B	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri	
	2	Wakasatres PPA dan PPO	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin pada Urmintu	BA	-	2		
	7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2		

1	2	3	4	5	6	7	
16	8	Kanit	AKP	IV A	3		
	9	Kasubnit	IP	IV B	6		
	10	Banit	BA	-	24		
							42
	0	SATRESNARKOBA					
	1	Kasatresnarkoba	KP	III B	1		
	2	Wakasatresnarkoba	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
6	Bamin pada Urmintu	BA	-	2			
7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2			
8	Kanit	AKP	IV A	2			
9	Kasubnit	IP	IV B	4			
10	Banit	BA	-	24			
					39		
17	0	SATBINMAS					
	1	Kasatbinmas	KP	III B	1		
	2	Wakasatbinmas	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1		
	8	Kanitbinpolmas	AKP	IV A	1		
	9	Kasubnit	IP	IV B	1		
	10	Banit	BA	-	2		
	11	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1		
	12	Kanitbintibsos	AKP	IV A	1		
	13	Kasubnit	IP	IV B	1		

1	2	3	4	5	6	7	
18	14	Banit	BA	-	2		
	15	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1		
	16	Kanitbinkamsa	AKP	IV A	1		
	17	Kasubnit	IP	IV B	1		
	18	Banit	BA	-	2		
	19	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1		
	20	Kanitbhabinkamtibmas	AKP	IV A	1		
	21	Kasubnit	IP	IV B	1		
	22	Banit	BA	-	2		
	23	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1		
						26	
		0	SATSAMAPTA				
		1	Kasatsamapta	KP	IIIB	1	
		2	Wakasatsamapta	AKP	IV A	1	
		3	Kaurbinopsnal	AKP	IV A	1	
		4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
		5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
		6	Bamin pada Urmintu	BA	-	1	
		7	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	1	
		8	Kanitturjawali	AKP	IV A	1	
		9	Kasubnit	IP	IV B	2	
		10	Banit	BA	-	60	
		11	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1	
	12	Kanitpamobvit	AKP	IV A	1		
	13	Kasubnit	IP	IV B	2		
	14	Banit	BA	-	20		
	15	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1		
	16	Kanitdalmas	AKP	IV A	1		
	17	Kasubnit	IP	IV B	3		

1	2	3	4	5	6	7	
19	18	Banit	BA	-	90	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.	
	19	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	1		
	20	Kanitpolsatwa*)	AKP	IV A	1*)		
	21	Kasubnit*)	IP	IV B	2*)		
	22	Banit*)	BA	-	8*)		
	23	Banum pada Subnit*)	PNS II/I	-	1*)	Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa	
	0	SATLANTAS					190
	1	Kasatlantas	KP	III B	1		
	2	Wakasatlantas	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	3		
	6	Kaurmintu	IP/PNS IIIa/b	IV B	1		
	7	Bamin pada Urmintu	BA	-	2		
	8	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2		
	9	Kanitturjagwali	AKP	IV A	1		
	10	Kasubnit	IP	IV B	2		
	11	Banit	BA	-	80		
	12	Kanitkamsel	AKP	IV A	1		
	13	Kasubnit	IP	IV B	3		
	14	Banit	BA	-	6		
	15	Kanitregident	AKP	IV A	1		
	16	Kasubnit	IP	IV B	3		
	17	Banit	BA	-	9		

1	2	3	4	5	6	7	
20	18	Kanitgakkum	AKP	IV A	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
	19	Kasubnit	IP	IV B	2		
	20	Banit	BA	-	12		
	21	Banum pada Unit	PNS II/I	-	4		
							136
		0	SATPAMOBVIT*)				
	1	Kasatpamobvit	KP	III B	1		
	2	Wakasatpamobvit	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	7	Kanitpamwaster	AKP	IV A	1		
	8	Panit	IP	IV B	2		
9	Banit	BA	-	10			
10	Banum	PNS II/I	-	2			
11	Kanitpamwisata	AKP	IV A	1			
12	Panit	IP	IV B	2			
13	Banit	BA	-	8			
14	Banum	PNS II/I	-	2			
					37		
21	0	SATPOLAIRUD*)				*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
1	Kasatpolair	KP	III B	1			
2	Wakasatpolair	AKP	IV A	1			
3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1			
4	Bamin/Banum	BA	-	2			
5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1			
6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2			
7	Kanitgakkum	AKP	IV A	1			

1	2	3	4	5	6	7
	8	Kasubnitlidik	IP	IV B	1	*) sesuai jumlah kapal yang ada
	9	Kasubnittindak	IP	IV B	1	
	10	Banit	BA	-	12	
	11	Banum	PNS II/I	-	1	
	12	Kanitpatroli	AKP	IV A	1	
	13	Kasubnitpatwalair	IP	IV B	1	
	14	Kasubnitbinmasair	IP	IV B	1	
	15	Banit	BA	-	10	
	16	Banum	PNS II/I	-	1	
	17	Kanitharkan Kapal	AKP	IV A	1	
	18	Banit	BA	-	4	
	19	Banum	PNS II/I	-	1	
	20	ABK Kapal*)				
					44	
22	0	SATTAHTI				
	1	Kasattahti	AKP	IV A	1	
	2	Baurmintu	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Kanitwattah	IP	IV B	1	
	4	Kanitbarbuk	IP	IV B	1	
	5	Bamin pada Unit	BA	-	8	
	6	Banum pada Unit	PNS II/I	-	6	
					18	
23	0	UNSUR PENDUKUNG SIKEU				
	1	Kasikeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Baurmin pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Kasubsigaji	IP/ PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kasubsiverif	IP/ PNS III a/b	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
24	5	Kasubsi APK	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	0	SIDOKKES			9	
	1	Kasidokkes	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Paurmin pada Kasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Bamin/Banum pada Urmin	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kasubsidokpol	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Kasubsikespol	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	6	Paur pada Subsidi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	7	Bamin/Banum pada Subsidi	BA/PNS II/I	-	2	
				9		

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE C

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1	1					2					2	
2	BAGOPS			1	3	6	7	17		1	9	10	27	
3	BAGREN			1	2	2	4	9		3	6	9	18	
4	BAG SDM			1	2	2	4	9		3	6	9	18	
5	BAG LOG			1	1	2	3	7		2	4	6	13	
6	SIWAS				1	3	2	6			2	2	8	
7	SIPROPAM				1	2	12	15			3	3	18	
8	SIHUMAS				1	2	1	4			2	2	6	
9	SIKUM				1	1	1	3		1	2	3	6	
10	SI TIK				1	2	4	7			3	3	10	
11	SIUM				1	1	6	8		1	7	8	16	
12	SPKT				1	3	12	16				0	16	
13	SATINTELKAM			1	5	10	48	64		1	5	6	70	
14	SATRESKRIM			1	7	11	70	89		1	8	9	98	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO
15	SATRES PPA DAN PPO*)			1	4	7	26	38		1	3	4	42	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
16	SATRESNARKOBA			1	3	5	26	35		1	3	4	39	
17	SATBINMAS			1	5	5	8	19		1	6	7	26	
18	SATSAMAPTA			1	5	7	171	184		1	5	6	190	
19	SATLANTAS			1	5	11	109	126		1	9	10	136	

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
20	SATPAMOBVIT*)			1	3	5	18	27		1	9	10	37	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
21	SATPOLAIRUD*)			1	4	5	28	38		1	5	6	44	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
22	SATTAHTI				1	2	9	12			6	6	18	
23	SIKEU				1	2	2	5		1	3	4	9	
24	SIDOKKES				1	2	1	4		3	2	5	9	
JUMLAH		1	1	13	59	98	572	744	0	24	108	132	876	*) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk

d. POLRES TIPE D

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
1	0	UNSUR PIMPINAN				
		PIMPINAN				
	1	Kapolres	AKBP	III A	1	
	2	Wakapolres	KP	III B	1	
					2	
2	0	UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN				
		BAGOPS				
	1	Kabagops	KP	III B	1	
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubbagbinops	AKP	IV A	1	
	4	Kasubbagdalops	AKP	IV A	1	
	5	Kasubbagkerma	AKP	IV A	1	
	6	Paur pada Subbag	IP	IV B	3	
	7	Pasiaga	IP	IV B	3	
	8	Bamin pada Subbag	BA	-	9	
9	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	3		
					23	
3	0	BAGREN				
	1	Kabagren	KP	III B	1	
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubbagstrajemen dan RB	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kasubbagrenprogar	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubbagdalprogar	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3	
7	Bamin pada Subbag	BA	-	6		

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
4	8	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	3	
	0	BAG SDM			17	
	1	Kabag SDM	KP	III B	1	
	2	Paurmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubbagbinkar	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kasubbagwatpers	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kasubbagdalpers	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	3	
7	Bamin pada Paur	BA/PNS II/I	-	3		
8	Banum pada Paur	PNS II/I	-	3		
5	0	BAGLOG			14	
1	Kabaglog	KP	III B	1		
2	Paurmin	IP/ PNS III a/b	IV B	1		
3	Kasubbagbekpal	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
4	Kasubbagfaskon	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
5	Paur pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	2		
6	Bamin pada Subbag	BA/PNS II/I	-	2		
7	Banum pada Subbag	PNS II/I	-	2		
6	0	SIWAS			10	
1	Kasiwas	AKP	IV A	1		
2	Baurmin pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1		
3	Kasubsionsnal	IP	IV B	1		
4	Kasubsibin	IP	IV B	1		
5	Kasubsidumas	IP	IV B	1		

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
7	6	Bamin/Banum pada Subsidi	BA/PNS II/I	-	3	
	0	SIPROPAM			8	
	1	Kasipropam	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	3	Kanitprovos	IP	IV B	1	
	4	Kanitpaminal	IP	IV B	1	
	5	Banit	BA	-	10	
6	Banum	BA	-	2		
8	0	SIHUMAS			17	
	1	Kasihumas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidi PIDM	IP	IV B	1	
	3	Kasubsipenmas	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
9	0	SIKUM			5	
	1	Kasikum	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsibankum	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kasubsiluhkum	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
10	0	SI TIK			5	
	1	Kasi TIK	IP	IV B	1	
	2	Baurmin/Banum pada Kasi	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Baurtekkom	BA	-	1	
	4	Baurtekinfo	BA	-	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
11	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	0	SIUM			8	
	1	Kasium	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Basubsimintu	BA/PNS II/I		1	
	3	Basubsiyanma	BA/PNS II/I		1	
	4	Bamin	BA	-	5	
	5	Banum	PNS II/I	-	5	
12	0	UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SPKT			13	
	1	Ka SPKT	IP	IV B	1	
	2	Kanit	IP	IV B	3	
	3	Banit	BA	-	9	
13	0	SATINTELKAM			13	
	1	Kasatintelkam	AKP	IV A	1	
	2	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum pada Urmintu	BA/PNS II/I	-	1	
	6	Kauryanmin	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum pada Uryanmin	BA	-	3	
	8	Kanit	IP	IV B	4	
9	Banit	BA	-	40		
				53		

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
17	0	SATBINMAS					
	4	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	5	Bamin pada Urmintu	BA	-	2		
	6	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	2		
	7	Kanit	IP	IV B	2		
	8	Banit	BA	-	16		
						26	
	1	Kasatbinmas	AKP	IV A	1		
	2	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	3	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
	4	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	5	Bamin	BA	-	2		
	6	Banum	PNS II/I	-	2		
	7	Kanitbinpolmas	IP	IV B	1		
8	Banit	BA	-	3			
9	Kanitbintibsos	IP	IV B	1			
10	Banit	BA	-	3			
11	Kanitbinkamsa	IP	IV B	1			
12	Banit	BA	-	3			
13	Kanitbhabinkamtibmas	IP	IV A	1			
14	Banit	BA	-	3			
					24		
18	0	SATSAMAPTA					
	1	Kasatsamapta	AKP	IV A	1		
	2	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	3	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1		
4	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1			

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN		
UNIT	JAB							
1	2	3	4	5	6	7		
19	5	Bamin pada Urmintu	BA	-	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.		
	6	Banum pada Urmintu	PNS II/I	-	1			
	7	Kanitturjawali	IP	IV B	1			
	8	Banit	BA	-	40			
	9	Kanitpamobvit	IP	IV B	1			
	10	Banit	BA	-	10			
	11	Kanitdalmas	IP	IV B	2			
	12	Kasubnit	IP	IV B	2			
	13	Banit	BA	-	60			
	14	Kanitpolsatwa*)	IP	IV B	1*)			
	15	Banit*)	BA	-	6*)			
	16	Banum pada Unit*)	PNS II/I	-	4*)			
							122	Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa
		0	SATLANTAS					
		1	Kasatlantas	AKP	IV A		1	
		2	Kaurbinopsnal	IP	IV B		1	
	3	Bamin/Banum pada Urbinopsnal	BA/PNS II/I	-	1			
	4	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1			
	5	Bamin pada Urmintu	BA		2			
	6	Banum pada Urmintu	PNS II/I		2			
	7	Kanitturjagwali	IP	IV B	1			
	8	Banit	BA		50			

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
20	9	Kanitkamsel	IP	IV B	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.	
	10	Banit	BA		6		
	11	Kanitregident	IP	IV B	1		
	12	Banit	BA		6		
	13	Kanitgakkum	IP	IV B	1		
	14	Banit	BA		10		
	15	Banum pada Unit	PNS II/I	-	4		
							88
		0	SATPAMOBVIT*)				
	1	Kasatpamobvit	AKP	IV A	1		
	3	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1		
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3		
	5	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	7	Kanitpamwaster	IP	IV B	1		
8	Panit	IP	IV B	1			
9	Banit	BA	-	8			
10	Banum	PNS II/I	-	1			
11	Kanitpamwisata	IP	IV B	1			
12	Panit	IP	IV B	1			
13	Banit	BA	-	6			
14	Banum	PNS II/I	-	1			
					28		
21	0	SATPOLAIRUD*)					
1	Kasatpolairud	AKP	IV A	1	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.		
2	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1			
3	Bamin/Banum	BA	-	2			

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
22	4	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	*) sesuai jumlah kapal yang ada	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
	6	Kanitgakkum	IP	IV B	1		
	7	Kasubnitlidik	IP	IV B	1		
	8	Kasubnittindak	IP	IV B	1		
	9	Banit	BA	-	8		
	10	Banum	PNS II/I	-	1		
	11	Kanitpatroli	IP	IV B	1		
	12	Kasubnitpatwalair	IP	IV B	1		
	13	Kasubnitbinmasair	IP	IV B	1		
	14	Banit	BA	-	6		
	15	Banum	PNS II/I	-	1		
	16	Kanitharkan Kapal	IP	IV B	1		
	17	Banit	BA	-	3		
	18	Banum	PNS II/I	-	1		
	19	ABK Kapal*)					
							34
		0	SATTAHTI				
		1	Kasattahti	IP	IV B		1
		2	Baurmintu/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Banitwattah	BA	-	1		
	4	Banitbarbuk	BA	-	1		
	5	Banit pada unit	BA	-	4		
					8		

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
23	2	UNSUR PENDUKUNG				
	0	SIKEU				
	1	Kasikeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin	BA	-	4	
	3	Banum	PNS II/I	-	4	
					9	
24	0	SIDOKKES				
	1	Kasidokkes	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Baurmin	BA/PNS II/I	-	1	
	3	Baursidokpol	BA/PNS II/I	-	1	
	4	Baursikespol	BA/PNS II/I	-	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					8	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE D

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN		1	1				2					2	
2	BAGOPS			1	3	6	9	19		1	3	4	23	
3	BAGREN			1	1	2	6	10		4	3	7	17	
4	BAG SDM			1	3	1	3	8		3	3	6	14	
5	BAG LOG			1	2	1	2	6		2	2	4	10	
6	SIWAS				1	3	3	7			1	1	8	
7	SIPROPAM				1	2	12	15			2	2	17	
8	SIHUMAS				1	2		3			2	2	5	
9	SIKUM				1	1	1	3		1	1	2	5	
10	SI TIK					1	7	8					8	
11	SIUM					1	7	8			5	5	13	
12	SPKT					4	9	13					13	
13	SATINTELKAM				1	6	43	50		1	2	3	53	
14	SATRESKRIM				1	5	42	48		1	6	7	55	Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO
15	SATRES PPA DAN PPO*)				1	4	20	25		1	3	4	29	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
16	SATRESNARKOBA				1	3	18	22		1	3	4	26	
17	SATBINMAS				1	5	14	20		1	3	4	24	
18	SATSAMAPTA				1	7	111	119		1	2	3	122	

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
19	SATLANTAS				1	5	74	80		1	7	8	88	
20	SATPAMOBVIT*)				1	5	14	20		1	7	8	28	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
21	SATPOLAIRUD*)				1	8	19	28		1	5	6	34	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
22	SATTAHTI					1	6	7			1	1	8	
23	SIKEU					1	4	5			4	4	9	
24	SIDOKKES					1	4	5			3	3	8	
JUMLAH		0	1	5	22	75	428	531	0	20	68	88	619	*) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO